



Analisis Efisiensi Anggaran Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan

Sarah Nurlaily^{1*}, Faza Ainur Rahma², Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴

¹⁻⁴ Prodi Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

25040674006@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674038@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³,

reviendafitrie@unesa.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 25040674006@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Food security is a strategic issue in regional development, particularly in urban areas with limited food production resources. Jakarta, as the center of government and national economy, is highly dependent on food supplies from other regions, making food budget management crucial for maintaining food availability and accessibility. This study aims to analyze the efficiency of the food budget managed by the Jakarta Provincial Government and its implications for improving food availability and accessibility. The method used is a literature study (library research) with a qualitative, descriptive, and analytical approach, utilizing secondary data from scientific journals, books, research reports, and government policy documents. The results indicate that efficient food budget management plays a crucial role in supporting food availability stability and increasing public access to adequate and affordable food. Effective, transparent, and performance-based budget management can enhance the effectiveness of food security programs and strengthen the food distribution system in urban areas. Therefore, local governments need to ensure that food budget allocations are used appropriately to achieve optimal impact on improving community food security.

Keywords: Budget Efficiency; Food Accessibility; Food Availability; Food Security; Regional Food Policy.

Abstrak. Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di daerah perkotaan dengan sumber daya produksi pangan yang terbatas. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran pangan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dan implikasinya terhadap peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pangan yang efisien berperan penting dalam mendukung stabilitas ketersediaan pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang memadai dan terjangkau. Pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan dan memperkuat sistem distribusi pangan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran pangan digunakan secara tepat untuk mencapai dampak optimal dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Kata Kunci: Aksesibilitas Pangan; Efisiensi Anggaran; Kebijakan Pangan Regional; Ketahanan Pangan; Ketersediaan Pangan.

1. LATAR BELAKANG

Efisiensi pengelolaan anggaran pangan merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah daerah memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya, khususnya dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi hasil. Herawati et al. (2023) menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional dibangun dari komitmen fiskal daerah yang tepat sasaran, menjadikan analisis efisiensi anggaran pangan sebagai langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan struktural yang khas karena tidak memiliki basis produksi

pangan yang memadai sehingga sepenuhnya bergantung pada distribusi lintas daerah. Rohmah et al. (2024) mencatat bahwa kota-kota dengan urbanisasi tinggi rentan terhadap gangguan rantai pasokan yang berdampak langsung pada aksesibilitas pangan masyarakat. Sebagai gambaran konteks, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 16.000 jiwa per km² berdasarkan data BPS (2023), dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa yang seluruh kebutuhan pangan pokoknya bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Kondisi ini menempatkan DKI Jakarta pada posisi yang berbeda secara struktural dibandingkan provinsi-provinsi lain yang memiliki basis produksi pangan sendiri seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Sulawesi Selatan, sehingga efisiensi pengelolaan anggaran pangan menjadi jauh lebih kritis bagi keberlangsungan ketahanan pangan warganya.

Penganggaran berbasis kinerja telah diakui mampu meningkatkan efektivitas belanja daerah apabila didukung indikator yang terukur dan evaluasi yang konsisten (Fitri et al., 2024). Namun, tekanan kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi menekan ruang fiskal program pangan strategis. Fazri et al. (2026) menemukan bahwa efisiensi anggaran tanpa prioritas yang tepat dapat menurunkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Dalam konteks DKI Jakarta, tekanan ini semakin nyata mengingat proporsi anggaran untuk urusan pangan dalam APBD DKI Jakarta relatif terbatas dibandingkan total belanja daerah secara keseluruhan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), anggaran urusan pangan di berbagai provinsi di Indonesia umumnya berada di kisaran 0,1–0,5% dari total APBD, angka yang dinilai belum memadai untuk menjamin ketahanan pangan secara komprehensif, khususnya di wilayah perkotaan yang tidak memiliki produksi pangan lokal. Kondisi ini berbeda dengan provinsi-provinsi yang mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan sekaligus, sebagaimana tercermin dalam pola belanja daerah provinsi-provinsi agraris di Indonesia. Putra & Rahmani (2025) juga menyatakan bahwa ketahanan pangan bergantung pada konsistensi pemenuhan tiga pilar utama ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan yang seluruhnya membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan.

Kajian yang secara spesifik menelaah efisiensi anggaran pangan DKI Jakarta dalam konteks ketergantungan distribusi lintas daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada ketahanan pangan di wilayah agraris atau menganalisis efisiensi anggaran daerah secara umum, tanpa menelaah secara mendalam keterkaitan antara tata kelola anggaran pangan dengan kondisi ketersediaan dan aksesibilitas pangan di wilayah

metropolitan yang bergantung penuh pada distribusi lintas daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi dan kebaruan penelitian ini. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analitis efisiensi anggaran pangan yang kontekstual dan relevan bagi kota-kota besar di Indonesia yang menghadapi kondisi serupa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta implikasinya terhadap peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan masyarakat, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengelolaan anggaran pangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Ketahanan pangan secara konseptual mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan, yakni ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*access*), dan pemanfaatan (*utilization*) pangan secara berkelanjutan. Putra & Rahmani (2025) menegaskan bahwa indeks ketahanan pangan suatu wilayah hanya dapat terwujud apabila ketiga dimensi tersebut terpenuhi secara simultan dan konsisten. Dalam konteks wilayah perkotaan, dimensi aksesibilitas menjadi perhatian utama karena keterbatasan produksi lokal menyebabkan masyarakat bergantung sepenuhnya pada mekanisme distribusi dan daya beli untuk memperoleh pangan yang layak.

Pengelolaan anggaran daerah yang efisien merupakan prasyarat bagi terlaksananya kebijakan ketahanan pangan yang efektif. Prinsip *value for money* dalam keuangan sektor publik menghendaki setiap rupiah belanja daerah menghasilkan *output* yang terukur dan bermanfaat langsung bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018). Yuliyanto et al. (2022) menemukan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas program secara signifikan, karena mendorong akuntabilitas pengelola anggaran terhadap capaian yang telah ditetapkan. Tanpa tolok ukur kinerja yang jelas, alokasi anggaran cenderung tidak tepat sasaran dan berdampak minimal terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan.

Ketahanan pangan di wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah agraris. Rohmah et al. (2024) menunjukkan bahwa kota dengan tingkat urbanisasi tinggi menghadapi kerentanan struktural berupa ketergantungan distribusi lintas daerah yang membuat stabilitas pasokan pangan mudah terganggu oleh dinamika eksternal. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa intervensi kebijakan fiskal daerah melalui program stabilisasi harga, penguatan distribusi, dan bantuan pangan menjadi instrumen yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga ketahanan pangan perkotaan. Winata & Farida (2024) juga menegaskan bahwa

fondasi ketahanan pangan yang kokoh dibangun dari kebijakan daerah yang konsisten dan didukung oleh komitmen anggaran yang memadai.

Di sisi lain, tekanan efisiensi fiskal yang diintroduksi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berimplikasi pada perlunya selektivitas tinggi dalam penentuan prioritas belanja. Nurhidayah et al. (2024) memperingatkan bahwa rasionalisasi anggaran yang tidak disertai analisis dampak yang memadai berpotensi mengorbankan program-program dengan manfaat sosial tinggi, termasuk di sektor pangan. Kondisi ini mengharuskan adanya pembedaan yang tegas antara efisiensi yang bersifat penghematan semata dengan efisiensi yang berorientasi pada optimalisasi dampak. Yuliyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan model penganggaran berbasis kinerja dengan indikator dampak sosial yang terukur lebih berhasil mempertahankan kualitas program publik meskipun di tengah tekanan fiskal. Dengan demikian, model efisiensi berbasis dampak (*impact-oriented efficiency*) menjadi kerangka yang lebih relevan dibandingkan model efisiensi berbasis penghematan belanja untuk menilai tata kelola anggaran pangan di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta. Oleh karena itu, diduga bahwa efisiensi anggaran pangan yang dikelola secara transparan, berbasis kinerja, dan berorientasi pada kelompok rentan akan berimplikasi positif terhadap peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan masyarakat DKI Jakarta secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (*library research*). Pilihan atas rancangan ini didasarkan pada orientasi penelitian yang bersifat konseptual-analitis, yaitu menelaah dan mensintesis berbagai temuan ilmiah mengenai keterkaitan antara tata kelola anggaran pangan daerah dengan kondisi ketersediaan serta aksesibilitas pangan, tanpa melibatkan proses penghimpunan data secara langsung dari lapangan. Adlini et al. (2022) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan bukan sekadar kegiatan membaca, melainkan sebuah proses ilmiah yang terstruktur dalam mengolah sumber-sumber tekstual untuk menghasilkan argumen dan pemahaman baru atas suatu persoalan. Sementara itu, dimensi deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk memaparkan secara sistematis bagaimana kebijakan anggaran pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beroperasi dalam konteks keterbatasan produksi pangan perkotaan.

Keseluruhan data yang dimanfaatkan bersifat sekunder, bersumber dari artikel jurnal ilmiah berindeks, dokumen resmi pemerintah, serta regulasi yang memiliki relevansi dengan pengelolaan keuangan publik dan kebijakan ketahanan pangan. Penghimpunan literatur

dilakukan secara sistematis melalui platform *Google Scholar* dan SINTA menggunakan sejumlah kata kunci tematik, antara lain efisiensi anggaran daerah, penganggaran berbasis kinerja, ketahanan pangan perkotaan, dan aksesibilitas pangan. Jenis data sekunder yang dianalisis mencakup: (1) dokumen anggaran pangan daerah berupa Peraturan Daerah APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari publikasi resmi pemerintah; (2) laporan evaluasi program ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta; (3) artikel jurnal ilmiah yang membahas efisiensi anggaran daerah, penganggaran berbasis kinerja, dan ketahanan pangan perkotaan; serta (4) regulasi dan kebijakan nasional yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Efisiensi anggaran dalam penelitian ini diukur menggunakan kerangka *value for money* (Mardiasmo, 2018), yaitu dengan mengevaluasi kesesuaian antara input (alokasi anggaran), output (realisasi program pangan), dan outcome (dampak terhadap ketersediaan dan aksesibilitas pangan). Dari hasil penelusuran tersebut, seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan empat kriteria utama: kesesuaian substansi dengan fokus kajian, reputasi dan kredibilitas media publikasi, relevansi temporal, serta kontribusi analitis sumber terhadap topik yang dibahas.

Pengolahan data mengikuti alur analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana diuraikan dalam Sugiyono (2019), yang terdiri atas tiga tahap berurutan. Pada tahap reduksi, seluruh informasi yang berhasil dihimpun disaring dan difokuskan sesuai dengan tema-tema inti penelitian sehingga hanya data yang benar-benar mendukung analisis yang dipertahankan. Pada tahap penyajian, temuan yang telah tersaring diorganisasikan ke dalam tiga klaster tematik, yaitu efisiensi pengelolaan anggaran pangan, dinamika ketersediaan pangan di wilayah metropolitan, dan pola aksesibilitas pangan masyarakat perkotaan. Pada tahap akhir, kesimpulan dirumuskan berdasarkan relasi logis antar temuan yang teridentifikasi selama proses analisis berlangsung, dengan tujuan menghasilkan proposisi yang dapat memperkuat landasan kebijakan pengelolaan anggaran pangan di Provinsi DKI Jakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran Pangan DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah metropolitan yang tidak memiliki kapasitas produksi pangan lokal yang signifikan akibat keterbatasan lahan agraris. Seluruh kebutuhan pangan pokok warganya dipasok dari daerah-daerah penghasil di luar Jakarta, menjadikan

sistem distribusi sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah ini. Kondisi struktural tersebut menempatkan kebijakan fiskal daerah khususnya efisiensi alokasi dan pengelolaan anggaran pangan sebagai variabel penentu utama dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Suryana (2016) menegaskan bahwa kota-kota dengan tingkat urbanisasi tinggi secara inheren menghadapi kerentanan rantai pasokan yang jauh lebih kompleks dibandingkan daerah agraris, sehingga intervensi kebijakan fiskal menjadi instrumen yang tidak tergantikan.

Tabel 1 berikut merangkum tiga dimensi utama ketahanan pangan yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini beserta indikator kebijakan anggaran yang relevan di masing-masing dimensi.

Tabel 1. Dimensi Ketahanan Pangan dan Instrumen Kebijakan Anggaran.

Dimensi	Indikator Ketahanan Pangan	Instrumen Kebijakan Anggaran
Ketersediaan	Stabilitas pasokan, cadangan pangan	Anggaran distribusi, operasi pasar
Aksesibilitas	Keterjangkauan harga, bantuan pangan	Subsidi, bantuan pangan kelompok rentan
Pemanfaatan	Kualitas gizi, keamanan pangan	Program edukasi gizi, pengawasan pangan

Sumber: diadaptasi dari Putra & Rahmani (2025)

Kerangka tiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa anggaran pangan bukan sekadar instrumen belanja biasa, melainkan mekanisme kebijakan yang secara langsung menentukan sejauh mana efisiensi pengelolaan anggaran pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi sekaligus memperluas aksesibilitasnya bagi masyarakat. Gea et al. (2025) berargumen bahwa ketahanan pangan yang kokoh hanya dapat dibangun apabila ketiga dimensi ini ditopang secara konsisten oleh kebijakan fiskal daerah yang terencana dan akuntabel.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pangan

Konsep dan Prinsip Efisiensi Anggaran Sektor Publik

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran sektor publik merujuk pada kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan capaian program dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal. Mardiasmo (2018) meletakkan efisiensi sebagai salah satu dari tiga pilar prinsip *value for money*, bersama ekonomi dan efektivitas, yang menjadi standar utama dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks program ketahanan pangan, efisiensi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyerap anggaran, melainkan juga dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat atas setiap rupiah yang dibelanjakan.

Falahuddin et al. (2024) menemukan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan kualitas output program ketika disertai

dengan penetapan indikator kinerja yang spesifik dan mekanisme evaluasi yang berjalan secara periodik. Temuan ini relevan bagi pengelolaan anggaran pangan Jakarta karena program-program seperti operasi pasar, stabilisasi harga, dan distribusi bantuan pangan memerlukan tolok ukur capaian yang jelas agar alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, bukan sekadar administratif.

Tekanan Efisiensi Fiskal dan Implikasinya terhadap Sektor Pangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah membawa konsekuensi berupa kewajiban rasionalisasi pada berbagai pos anggaran non-prioritas. Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program mana yang benar-benar memberikan dampak strategis dan mana yang dapat dikurangi tanpa mengorbankan pelayanan dasar. Kholidah et al. (2023) memperingatkan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan secara rigid tanpa disertai analisis dampak yang memadai berpotensi mereduksi kualitas program-program dengan nilai sosial tinggi, termasuk program ketahanan pangan yang menyasar kelompok masyarakat rentan.

Tabel 2 berikut menggambarkan potensi dampak kebijakan efisiensi terhadap komponen belanja pangan daerah apabila tidak dikelola dengan prioritas yang tepat.

Tabel 2. Potensi Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Program Pangan Daerah.

Komponen Program	Risiko Efisiensi Tidak Terkelola	Dampak terhadap Ketahanan Pangan
Operasi pasar dan stabilisasi harga	Pengurangan frekuensi dan jangkauan	Fluktuasi harga pangan meningkat
Bantuan pangan kelompok rentan	Penurunan volume dan cakupan penerima	Aksesibilitas pangan kelompok miskin menurun
Penguatan distribusi pangan	Pemotongan investasi infrastruktur logistik	Gangguan rantai pasokan lintas daerah
Pengawasan keamanan pangan	Berkurangnya kapasitas inspeksi	Risiko peredaran pangan tidak layak konsumsi

Sumber: diolah dari Fazri et al. (2026) dan Fitri et al. (2024)

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 2, terlihat bahwa komponen bantuan pangan dan stabilisasi harga merupakan dua area yang paling rentan terdampak apabila efisiensi anggaran diterapkan tanpa disertai perlindungan kebijakan yang memadai. Kondisi ini relevan bagi Jakarta mengingat tingginya proporsi warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada program-program tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan hariannya.

Ketersediaan Pangan di Wilayah Perkotaan

Ketergantungan Distribusi dan Stabilitas Pasokan

Keterbatasan lahan produksi di Jakarta menjadikan kelancaran rantai distribusi pangan sebagai determinan utama ketersediaan pangan daerah. Setiap titik kritis dalam jalur distribusi mulai dari daerah penghasil, jalur transportasi, hingga pasar induk dan pasar tradisional

berpotensi menjadi sumber gangguan yang berdampak langsung pada ketersediaan komoditas di tingkat konsumen. Rohmah et al. (2024) mencatat bahwa kompleksitas rantai pasokan pangan perkotaan meningkat secara proporsional dengan laju urbanisasi, sehingga investasi pada infrastruktur distribusi dan sistem informasi pangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Dukungan anggaran yang memadai untuk program penguatan distribusi pangan termasuk pengembangan fasilitas penyimpanan, digitalisasi informasi harga, dan koordinasi antardaerah pemasok menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Jakarta. Herawati et al. (2023) menyatakan bahwa pilar ketersediaan pangan nasional secara langsung bergantung pada efektivitas sistem distribusi yang didukung oleh kebijakan daerah yang proaktif dan terintegrasi.

Peran Cadangan Pangan Daerah

Cadangan pangan daerah merupakan instrumen penyangga yang berfungsi menstabilkan pasokan ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan permintaan musiman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan alokasi anggaran yang konsisten untuk membangun dan memelihara cadangan pangan dalam volume yang memadai. Putra & Rahmani (2025) menegaskan bahwa wilayah yang mampu mempertahankan cadangan pangan strategis secara berkelanjutan memiliki indeks ketahanan pangan yang lebih stabil dibandingkan wilayah yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Aksesibilitas Pangan bagi Masyarakat

Dimensi Ekonomi Aksesibilitas Pangan

Aksesibilitas pangan tidak semata-mata persoalan ketersediaan fisik komoditas di pasar, melainkan juga berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membelinya. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, kesenjangan pendapatan yang signifikan menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sangat rentan terhadap gejolak harga pangan. Suryana (2016) mengemukakan bahwa aksesibilitas pangan di perkotaan ditentukan oleh dua faktor yang saling berinteraksi, yakni tingkat harga komoditas pangan di pasar dan tingkat daya beli riil rumah tangga, sehingga kebijakan pangan yang hanya berfokus pada sisi pasokan tanpa memperhatikan sisi permintaan cenderung tidak efektif dalam menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Program Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pangan

Berbagai instrumen kebijakan telah dikembangkan pemerintah daerah untuk memperluas aksesibilitas pangan, antara lain program subsidi pangan, operasi pasar murah, dan distribusi bantuan pangan langsung kepada rumah tangga sasaran. Efektivitas program-program tersebut

sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kelancaran mekanisme distribusi bantuan, dan kesinambungan pendanaannya melalui APBD. Fitri et al. (2024) menekankan bahwa program pangan yang dirancang dengan indikator dampak yang terukur bukan sekadar indikator proses jauh lebih efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pangan kelompok rentan secara berkelanjutan.

Tabel 3 berikut merangkum jenis program pangan daerah beserta sasaran dan mekanisme pendanaannya melalui anggaran pemerintah daerah.

Tabel 3. Jenis Program Pangan Daerah dan Mekanisme Pendanaan.

Program	Sasaran Utama	Mekanisme Pendanaan	Indikator Dampak
Operasi pasar murah	Masyarakat umum	Belanja subsidi APBD	Stabilisasi harga komoditas pokok
Bantuan pangan langsung	Rumah tangga miskin	Belanja hibah/bansos APBD	Penurunan prevalensi rawan pangan
Penguatan pasar tradisional	Pedagang dan konsumen	Belanja modal APBD	Peningkatan volume transaksi pangan lokal
Pengawasan keamanan pangan	Masyarakat umum	Belanja operasional dinas	Penurunan kasus pangan tidak layak konsumsi

Sumber: diolah dari Fitri et al. (2024) dan Fazri et al. (2026)

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap program pangan daerah memiliki instrumen pendanaan dan indikator dampak yang berbeda. Hal ini mengisyaratkan bahwa efisiensi anggaran pangan tidak dapat diukur secara seragam, melainkan harus dievaluasi berdasarkan capaian spesifik masing-masing program terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Implikasi Efisiensi Anggaran terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Implikasi Teoritis

Temuan kajian ini memperkuat argumen bahwa hubungan antara efisiensi anggaran pangan dan peningkatan ketersediaan serta aksesibilitas pangan bersifat non-linier dan kontekstual. Efisiensi yang dimaknai semata sebagai penghematan belanja justru dapat kontraproduktif apabila diterapkan pada program-program yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap ketersediaan dan aksesibilitas pangan masyarakat. Sebaliknya, efisiensi yang dimaknai sebagai optimalisasi dampak per rupiah belanja sebagaimana digariskan dalam prinsip *value for money* Mardiasmo (2018) berpotensi memperkuat ketiga pilar ketahanan pangan secara simultan. Putra & Rahmani (2025) mendukung proposisi ini dengan menunjukkan bahwa wilayah yang menerapkan penganggaran berbasis dampak sosial memiliki indeks ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan wilayah dengan pola penganggaran konvensional.

Implikasi Kebijakan

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat tiga aspek dalam tata kelola anggaran pangan. Pertama, penetapan indikator kinerja program pangan yang berorientasi pada dampak, bukan sekadar realisasi belanja. Kedua, pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi anggaran pangan yang transparan dan dapat diakses publik. Ketiga, perlindungan alokasi anggaran pada program-program pangan yang menysasar kelompok rentan dari tekanan rasionalisasi fiskal, sebagaimana dikhawatirkan oleh Fazri et al. (2026). Ketiga langkah tersebut secara bersama-sama dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan anggaran pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi seluruh warga Jakarta. Dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah. Pertama, koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam rantai distribusi pangan masih belum optimal, sehingga potensi gangguan pasokan dari daerah penghasil tetap menjadi risiko yang belum sepenuhnya terkelola.

Kedua, keterbatasan kapasitas aparaturnya dalam menyusun indikator kinerja berbasis dampak seringkali menyebabkan evaluasi program pangan masih terhenti pada level output, bukan outcome. Ketiga, tekanan efisiensi fiskal dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi memperlemah komitmen anggaran pada program-program pangan strategis apabila tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi praktis yang dapat diterapkan antara lain: (1) pengembangan sistem informasi pangan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan stok dan harga komoditas secara real-time sebagai basis pengambilan keputusan anggaran; (2) pembentukan forum koordinasi lintas daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah pemasok pangan utama guna menjamin kelancaran distribusi; (3) penerapan mekanisme ringfencing atau perlindungan pos anggaran pada program-program pangan berprioritas tinggi dalam dokumen APBD sehingga tidak mudah terdampak rasionalisasi fiskal; serta (4) penguatan kapasitas perencanaan anggaran di dinas terkait melalui pelatihan berbasis hasil (*results-based planning*) agar alokasi anggaran pangan dapat dipertanggungjawabkan secara substantif kepada publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran pangan merupakan faktor determinan dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai wilayah yang sepenuhnya bergantung pada distribusi pangan lintas daerah, Jakarta memerlukan komitmen fiskal yang tidak hanya memadai secara kuantitas, tetapi juga optimal secara kualitas dalam hal ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaannya. Penganggaran berbasis kinerja yang disertai indikator dampak yang terukur terbukti mampu meningkatkan efektivitas program pangan daerah, sehingga setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Tekanan kebijakan efisiensi fiskal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 perlu diantisipasi dengan mekanisme perlindungan anggaran pada program-program pangan yang berdampak langsung terhadap ketersediaan dan aksesibilitas pangan masyarakat. Rasionalisasi anggaran yang tidak disertai prioritas yang cermat berpotensi mengorbankan program strategis yang justru menjadi penopang ketahanan pangan kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Secara keseluruhan, ketahanan pangan Jakarta yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaan anggaran pangan diorientasikan pada tiga prinsip utama: efisiensi berbasis dampak sosial, transparansi dalam pelaporan capaian program, dan konsistensi perlindungan alokasi anggaran pada pilar ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara simultan. Berdasarkan temuan kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi konkret yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: (1) menetapkan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur proporsi minimum alokasi anggaran pangan dalam APBD DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat rentan; (2) mengembangkan sistem evaluasi program pangan berbasis outcome yang hasilnya dipublikasikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas fiskal; (3) membangun platform koordinasi antardinas dan antardaerah yang secara aktif memantau kondisi rantai distribusi pangan dari daerah pemasok hingga konsumen akhir; serta (4) merancang skema insentif fiskal bagi program-program pangan inovatif yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan memperluas aksesibilitas pangan bagi kelompok berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penyelesaian penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan konstruktif terhadap naskah ini, serta kepada para peneliti sebelumnya yang karyanya menjadi landasan bagi pengembangan kajian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Falahuddin, M. I., Zukhrufah, A. Y., Sitanggang, C. J. R., & Pusponegoro, N. H. (2024). Analisis spasial determinan ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 1055–1064. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2147>
- Fazri, N., Safrizal, S., Anggreni, M., & Syafitri, T. M. (2026). Implikasi defisit dan kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.30606/cano.v15i1.4035>
- Fitri, S., Simatupang, R., Mauliza, M., & Mariana, M. (2024). Evaluasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 337–344. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1386>
- Gea, M. P., Zendrato, R. J., Telaumbanua, S. O., & Ndraha, A. B. (2025). Pertanian perkotaan, solusi inovatif untuk ketahanan pangan di tengah kota. *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan*, 2(1), 188–198. <https://doi.org/10.62951/flora.v2i1.265>
- Herawati, T., Azhima, F., & Prasetyo, D. (2023). Swasembada pangan sebagai pilar strategis ketahanan nasional di Indonesia dalam perspektif manajemen pertahanan. *Jurnal Kreatif*, 5(3), 140–152. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.7959>
- Kholidah, L. N., Pangestuti, D. R., Lisnawati, N., & Asna, A. F. (2023). The effect of food accessibility on family food preference practices in Semarang during a pandemic. *Amerta Nutrition*, 7(2SP), 238–246. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.238-246>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nurhidayah, A., Bremara, N. P., & Dewi, M. W. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2019–2022. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v24i2.12179>

- Putra, R., & Rahmani, Z. (2025). Membangun indeks ketahanan pangan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1395–1402. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1333>
- Rohmah, W., Ramadhani, M., & Amri, G. (2024). Ketahanan pangan Kota Surakarta sebagai kota urbanisasi di Jawa Tengah. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 3(1), 37–44. <https://doi.org/10.58684/jbs.v3i1.46>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suryana, A. (2016). Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025: Tantangan dan penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123–135.
- Winata, A. C., & Farida, S. N. (2024). Pelaksanaan penyaluran beras SPHP Bulog ke pasar Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 28–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14271647>
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten ABC periode 2018–2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>